

BAB II

PEMBAHASAN

A. Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*Strafbaar feit*”. Istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan “*Strafbaar feit*”. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut.⁸

Menurut Simons, “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.⁹ Van Hamel dalam bukunya Moeljatno menyatakan “*Strafbaar feit*” adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam kitab yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.¹⁰

Hazewinkel-Suringa dalam bukunya Lamintang mengartikan: *Strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”. Pompe dalam bukunya Lamintang menyebutkan bahwa: *Strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu

⁸Adami Chazawi, 2002, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surakarta, hlm. 67.

⁹Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, hlm.56.

¹⁰*Ibid.*

pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹¹

Dari pengertian tindak pidana di atas, Lamintang menjabarkan dua unsur, yaitu unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Yang termasuk unsur-unsur subyektif antara lain:¹²
 - 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*);
 - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
 - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - 5) Perasaan takut seperti antara lain yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;
- b. Unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan

¹¹Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 181-182.

¹²*Ibid*, hlm. 195-196.

dari si pelaku itu harus dilakukan. Yang termasuk unsur-unsur obyektif antara lain:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara pelaku dengan tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut dapat dibuat suatu kesimpulan mengenai tindak pidana, yaitu :

- 1) Suatu perbuatan melawan hukum
- 2) Orang yang dikenai sanksi harus mempunyai kesalahan (asas tiada pidana tanpa kesalahan). Kesalahan sendiri terdiri dari kesalahan yang disebabkan secara sengaja dan yang disebabkan karena kelalaian
- 3) Subjek atau pelaku baru dapat dipidana jika ia dapat bertanggung jawab dalam artian berpikiran waras.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Belum ada suatu definisi hukum yang tepat di Indonesia tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Di dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation*, *slander*, *libel* yang dalam bahasa Indonesia (*Indonesian translation*) diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan) sedangkan *Libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara *slander* dan *libel*. R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang

kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa “malu”. “Kehormatan” yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil.¹³ Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam KUHP ada 4 macam yaitu :

- a. Menista secara lisan (“*smaad*”);
- b. Menista dengan surat/tertulis (“*smaadschrift*”);
- c. Memfitnah (“*laster*”);
- d. Fitnah dengan perbuatan (“*lasterlijke verdachtmaking*”).

Ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang terdapat dalam Bab XVI, Buku II. KUHP masih relevan. Penghinaan atau *defamation* secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Apabila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana apabila dibandingkan dengan penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi :

” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

¹³R.Susilo, 1988, *Komentar dan Pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hlm. 56.

Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak;
- c. Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- d. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum.

Pengertian setiap orang di sini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melanggar yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, yang dapat mengganggu sifat ketidakadilan tersebut.

Perbuatan di atas dapat mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang timbul merupakan delik yang dianggap sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Dengan demikian delik ini termasuk delik formil atau delik dengan perumusan formil yaitu pencemaran nama baik. Dalam pasal ini tidak perlu dibuktikan akibat dari pencemaran nama baik, yang penting bahwa secara formil, informasi elektronik dan dokumen elektronik telah mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang.

Pasal 310 ayat (1) KUHP berbunyi :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang tampak sederhana dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan denda dan sanksi pidana dalam penghinaan KUHP.

Pasal 45 ayat (1) menentukan :

”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 28 ayat (1) menentukan :

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :

- a. Setiap orang;
- b. Sengaja dan tanpa hak;
- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
- d. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Masih ada lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, yaitu :

Pasal 36 UU ITE

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Pasal 51 ayat (2) UU ITE

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (du belas milyar rupiah).”

3. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan *the oldest social problem*. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah sebagai berikut :

“Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

- a. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi;
- b. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut:

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;

- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*).¹⁴

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem menyebutkannya sebagai “*older philosophy of crime control*”.¹⁵

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.¹⁶

Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).¹⁷

Dalam hal ini Sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan

¹⁴P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.41.

¹⁵Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV ANANTA, Semarang, HLM. 18.

¹⁶Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 4.

¹⁷*Ibid*, hlm.27.

politik kriminal atau *social defence planning*” yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.¹⁸

Hermann Mannheim mengemukakan bahwa dalam hukum pidana terdapat dua masalah utama yang dihadapi, yaitu:

- a. penentuan pandangan tentang nilai-nilai terpentingnya (*the most important values*) manakah yang ada pada masa pembangunan ini;
- b. penentuan apakah nilai-nilai itu diserahkan untuk dipertahankan oleh hukum pidana atau diserahkan pada usaha-usaha lain untuk mempertahankannya.¹⁹

Dalam kebijakan hukum pidana terdapat dua masalah sentral yang harus ditentukan, yaitu:

- a. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada di pelanggar.

Masalah sentral yang pertama umumnya disebut sebagai proses kriminalisasi, sedangkan masalah yang kedua dikenal dengan proses penalisasi.

Adapun alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi :

- a. Adanya korban; artinya, perbuatan tersebut harus menimbulkan sesuatu yang buruk atau menimbulkan kerugian.
- b. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
- c. Harus berdasarkan asas *ratio principle*, dan
- d. Adanya kesepakatan sosial (*public support*)

¹⁸Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 157.

¹⁹Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 108.

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial, maka Sudarto berpendapat dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (*materiil dan atau spirituil*) atas warga masyarakat; Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”. (*cost-benefit principle*);
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).²⁰

Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai tertentu yang perlu dilindungi. Adapun kepentingan-kepentingan sosial yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pemeliharaan tertib masyarakat;

²⁰Muladi, *Op.Cit*, hlm. 61

- b. perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- c. memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
- d. memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.²¹

Ditegaskan selanjutnya oleh Bassiouni, bahwa: Sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan tersebut. Pidana hanya dibenarkan apabila ada kebutuhan yang berguna bagi masyarakat ; pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasarkan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai yang mewujudkannya. Jadi dalam hal ini, disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga berdasarkan dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and value – oriented*).

Dalam hal kriminalisasi dan dekriminalisasi, Bassiouni berpendapat harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor sebagai berikut :

- a. keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai;
- b. analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari;

²¹Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm.53.

- c. penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia;
- d. pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.²²

Selanjutnya, dikemukakan oleh Bassiouni sebagai berikut: bahwa pendekatan yang berorientasi pada kebijakan akan memunculkan permasalahan, yakni berkenaan dengan pengambilan keputusan yang tidak mengakomodir faktor nilai-nilai yang merupakan faktor subjektif, sehingga keputusan yang diambil cenderung akan pragmatis dan kuantitatif.

Masih menurut Bassiouni dikemukakan, bahwa penilaian emosional seyogyanya oleh badan-badan legislatif dijadikan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan tersebut (*the emotionally laden value judgment approach*). Sedangkan, pendekatan kebijakan dipertimbangkan sebagai salah satu *scientific device* digunakan sebagai alternatif. Hal ini digunakan untuk menghindari proses kriminalisasi yang berlebihan, yang dapat menimbulkan:

- a. krisis kelebihan kriminalisasi (*the crisis of over-criminalization*),
- b. krisis kelampauan batas dari hukum pidana (*the crisis of overreach of the criminal law*).

Berkaitan dengan kemungkinan terjadinya *over-criminalization* jika proses kriminalisasi berjalan terus-menerus, maka prinsip-prinsip model *law* yang dibuat oleh *organization for economic co-operation and development* (OECD) dapat

²²Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, *Op.Cit*, hlm.32

dijadikan pedoman untuk menghindarkan *under and overcriminalization*, yakni sebagai berikut:²³

- a. *ultima ratio principle*, Hukum pidana disiapkan sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas, meskipun pada kenyataannya dewasa ini dunia internasional mulai mengarahkan hukum pidana sebagai premum remedium, khususnya pidana denda yang sekaligus dapat digunakan sebagai dana bagi pembangunan di suatu Negara.
- b. *precision principle* ketentuan hukum pidana harus tepat dan teliti menggambarkan suatu tindak pidana. Perumusan hukum pidana yang bersifat samar dan umum harus dihindari.
- c. *clearness principle*, tindakan yang dikriminalisasikan harus digambarkan secara jelas dalam ketentuan hukum pidana.
- d. *principle of differentiation*, adanya kejelasan perbedaan ketentuan yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini perlu dihindari perumusan yang bersifat global/terlalu luas, *multipurpose* atau *all embracing*.
- e. *principle of intent*, tindakan yang dikriminalisasikan harus dengan dolus (*intention*), sedangkan untuk tindakan culpa (*negligence*) harus dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran kriminalisasinya.
- f. *principle of victim application*, penyelesaian perkara pidana harus memperhatikan permintaan atau kehendak korban. Dalam hal ini kepentingan korban harus diatur dalam rangka pidana dan pembedaan.

Menurut Muladi terdapat 3 (tiga) metode pendekatan dalam kebijakan kriminalisasi dan penalisasi, yaitu:²⁴

²³Muladi, *Op.Cit*, hlm.165.

- a. Metode Evolusioner (*evolutionary approach*), Metode ini memberikan perbaikan, penyempurnaan dan amandemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya.
- b. Metode Global (*global approach*), Metode ini dilakukan dengan membuat peraturan tersendiri di luar KUHP.
- c. Metode Kompromis (*compromise approach*), Metode ini dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam KUHP mengenai tindak pidana tertentu.

Kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana ini diantaranya sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Bahwa itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), terungkap dalam pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

Sudarto pernah mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan

²⁴Muladi, *Op.Cit*, hlm.167.

dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain, penanggulangan kejahatan, dan lain-lain), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik criminal atau *social defence planning*, dan ini pun harus merupakan bagian integral dan rencana pembangunan nasional.²⁵

Kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen. Kebijakan integral dengan penekanan pada pengurangan atau penghapusan kondisi-kondisi yang memberikan kesempatan untuk timbulnya kejahatan juga sangat mendapatkan perhatian dari Kongres PBB ke-7 tahun 1985. Ditegaskan di dalam dokumen kongres mengenai “*Crime prevention in the context of development*” (dokumen A/CONF.121/L.9), bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan “strategi pencegahan yang mendasar” (*the basic crime prevention strategies*). Sikap dan strategi yang demikian juga dilanjutkan dalam Kongres ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba. Dalam dokumen kongres No.A/CONF.144/L/17 (tentang “*Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*”), antara lain dinyatakan:

- a. bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan strategis penanggulangan kejahatan dan harus diberikan prioritas paling utama;

²⁵Sudarto, 1981, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm 104.

- b. bahwa tujuan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan kerja sama ekonomi internasional hendaknya ditujukan untuk menjamin hak-hak asasi manusia untuk suatu kehidupan yang bebas dari kelaparan, kemiskinan, kebuta hurufan, kebodohan, penyakit dan ketakutan akan perang serta memberi kemungkinan bagi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Dalam Kongres ke-8 diidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih luas dan terperinci. (khususnya dalam masalah “*Urban Crime*”), antara lain ²⁶:

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebuta hurufan (kebodohan) ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok atau serasi;
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses intregrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga
- d. Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian atau kelemahan dibidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;

²⁶Eighth UN Congress, Dokumen A/CONF .144/L.3, dalam buku Kebijakan Hukum Pidana, Raja Grafindo, Semarang, 2011, hlm 13 Dalam skripsi dari Kris Demirto Faot dengan Judul skripsi Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Timika Papua.

- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan atau bertetangga;
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut diatas.
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;
- j. Dorongan-dorongan ide dan sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan atau sikap-sikap intoleransi.

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan terdapat tiga cara yaitu, Pre-emptif, preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan dan tindakan represif (usaha sesudah terjadinya kejahatan).

Tindakan Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A Qiron Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.²⁷

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.²⁸ Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan. Jadi lembaga permasyarakatan bukan hanya tempat untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaiknya dilakukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sistem dan operasi Kepolisian yang baik.
- b. Peradilan yang efektif.
- c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa.
- d. Koordinasi antar penegak hukum dan aparaturnya pemerintah yang serasi.
- e. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan.
- f. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

²⁷A. Qiron Samsudin M, Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.45

²⁸Soejono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, hlm.32.

g. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan.²⁹

Pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan sebagaimana tersebut diatas merupakan serangkaian upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh polisi dalam rangka menanggulangi kejahatan. Hal menarik yang dari pernyataan di atas adalah:

- a. Kejahatan tidak dipandang sebagai “masalah hukum” semata, tetapi sebagai masalah sosial;
- b. Penanggulangan kejahatan bukan semata-mata urusan para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan), tetapi sebagai “masalah atau urusan dalam negeri” yang melibatkan berbagai departemen.
- c. Penanggulangan kejahatan dilakukan secara integral dengan lebih di fokuskan pada upaya preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan dengan menanggulangi “sebab dan kondisi.”

B. Tinjauan Tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Putusan diartikan sebagai hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan.³⁰ Di dalam pasal 1 butir 11 KUHP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Leden Marpaun mendefinisikan, putusan hakim sebagai hasil atau

²⁹Soejono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, hlm.76.

³⁰Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 406.

kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.

Sedangkan Lilik Mulyadi mempunyai pendapat sendiri mengenai putusan hakim dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

2. Bentuk Putusan

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.³¹ Berdasarkan kemungkinan-kemungkinan dari hasil musyawarah diatas, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara berbentuk :

a. Putusan bebas

Putusan bebas diatur dalam pasal 191 ayat (1) yang berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrij spraak*) atau "*acquittal*", yakni terdakwa dibebaskan dari pemidanaan . Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan :

³¹Harahap,,M. Yahya, 1985,*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta :Pustaka Kartini, hlm. 864.

- 1) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif.

Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus tidak diyakini oleh hakim.

- 2) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam 183 KUHP.

b. Putusan pengelepasan dari segala tuntutan hukum

Putusan pengelepasan dari segala tuntutan hukum atau biasa disebut sebagai dengan "*onslag van recht vervolging*" diatur dalam 191 ayat (2), yang bunyinya, " Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Dari bunyi diatas, kiranya putusan pengelepasan dari segala tuntutan hukum didasarkan pada kriteria :

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan.
- 2) Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

c. Putusan pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 yang berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan

dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan pada penilaian pengadilan.

C. Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dengan Menggunakan Informasi elektronik Pada Kasus Prita Melalui Putusan Pengadilan Negeri No. 1269/ Pid.B/2009/PN. TNG, Putusan Pengadilan Tinggi No. 95/Pid/2009/PT. BTN Serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 822 K/ Pid.Sus/2010.

1. Putusan Pengadilan Negeri No. 1269/ Pid.B/2009/PN. TNG

a. Kasus Posisi :

Perkara ini berawal dari tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 wib Prita datang ke R.S Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan darah diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah 27.000, pada waktu Terdakwa ditangani oleh dr. Indah (umum) dan dinyatakan harus dirawat inap.

Dr. Hengky memeriksa kondisi Prita yang disampaikan melalui anamnesa yaitu suspect demam berdarah dengan diagnose banding viral (infeksi virus) dan infeksi sekunder, sehingga malam itu Terdakwa diinfus dan diberikan suntikan. Keesokan paginya dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000, selanjutnya tangan kiri Terdakwa mulai membengkak dan Terdakwa meminta dihentikan suntikan.

Kemudian karena menurut Prita kondisi semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata mengalami pembengkakan akhirnya Prita keluar dari R.S. Omni Internasional Alam Sutra Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan hasil diagnosa akhir parotitis (gondongan) dan langsung menuju RSI Bintaro Tangerang serta dari tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008.

Prita menyampaikan keluhan secara tertulis ke manajemen Omni yang diterima oleh OGI (*Customer Service Coordinator*) dan dr. Grace Hilza Yarren Nela (*Customer Service Manager*) dimana yang menjadi objek keluhan adalah kondisi kesehatan tubuh Terdakwa pada saat masuk UGD, hasil laboratorium dan pada saat keluar dari R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, selama perawatan tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatan dari dr. Hengky Gosal, Sp.PD. Akan tetapi ditanggapi dr. Grace mengenai masalah keluhan tersebut dengan tidak profesional sehingga membuat dan mengirimkan E-mail atau surat elektronik. Kemudian Prita mengirim E-mail tersebut melalui alamat e-mail “Prita Mulyasari”@ yahoo.com” ke sejumlah orang yang berjudul “Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang.”

Prita dianggap telah melanggar Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah melalui proses pengadilan tingkat pertama RS OMNI Internasional menggugat secara pidana kepada Prita. Pengadilan Negeri membebaskan Prita. Merasa tidak puas dengan putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang pihak RS OMNI Internasional mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tangerang. Pengadilan Tinggi Tangerang menolak keberatan dari pihak Prita dan menerima perlawanan dari pihak RS OMNI INTERNASIONAL . Berdasarkan hal tersebut Prita mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Prita, menolak putusan Pengadilan Negeri dan pengadilan tinggi serta menolak gugatan RS OMNI Internasional.

b. Dakwaan

Dakwaan Pertama:

Bahwa perbuatan Terdakwa Prita Mulyasari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008;

Dakwaan Kedua:

Perbuatan Terdakwa Prita Mulyasari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP;

Dakwaan Ketiga:

Perbuatan Terdakwa Prita Mulyasari Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;

c. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum:

- 1) Menyatakan Terdakwa Prita Mulyasari bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NomorReg Perkara: PDM – 432/ TNG/05/ 2009, Tanggal 20 Mei 2009;

- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Prita Mulyasari dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar print out website/e-mail yang dikirimkan oleh Prita Mulyasari tanggal 15 Agustus 2008, dengan subyek “penipuan Omni International Hospital Alam Sutra Tangerang”;
 - 1(satu) eksemplar e-mail berjudul “selamat pagi.....SEMOGA TIDAK TERJADI DI RSIB!!! Selamat bekerja.....salam, Juni, bertanggal 22 Agustus 2008.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah, membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah).

d. Putusan Pengadilan Negeri (Nomor :1269/ Pid.B/2009/PN. TNG)

- 1) Menyatakan Terdakwa **PRITA MULYASARI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu, Kedua dan Ketiga ;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut ;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar berita di Yahoo email dengan subjek : Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutra Tangerang,tanggal 15, 2008,

3: 51 PM, subjek : Penipuan OMNI Internasional Hospital Alam Sutera
Tangerang ;

- Tetap terlampir dan berkas perkara ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

2. Putusan Pengadilan Tinggi (Nomor : 95/Pid/2009/PT. BTN)

- a. Menerima perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 25 Juni 2009 Nomor : 1269/Pid.B/2009/PN.TNG yang dimintakan perlawanan tersebut.
- c. Menolak keberatan / Ekspesi Terdakwa dan Terdakwa seluruhnya;
- d. Memerintahkan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa perkara atas nama Terdakwa : PRITA MULYASARI berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-432/TNG/05/2009, tanggal 20 Mei 2009 dan selanjutnya memutus perkara tersebut;
- e. Menunda biaya perkara dalam Kedua tingkat pengadilan sampai putusan akhir.

3. Putusan Mahkamah Agung (Nomor:822 K/ Pid.Sus/ 2010)

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Tangerang tersebut
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009
- c. Menyatakan Terdakwa Prita Mulyasari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat

diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik”.

- d. Menghukum Terdakwa Prita Mulyasari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
- e. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dalam waktu masa percobaan selama 1 (satu) Tahun, Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum
- f. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara
- g. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Terdakwa Prita Mulyasari tersebut
- h. Menghukum pemohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Analisis

a. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1269/Pid.B/2009/PN. TNG

Dalam kasus ini penulis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menyatakan bahwa, *“e-mail Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas tidak bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, karena kalimat tersebut adalah kritik dan demi kepentingan umum agar masyarakat terhindar dari praktek-praktek rumah sakit dan/atau dokter yang tidak memberikan pelayanan medis yang baik terhadap orang sedang sakit yang mengharapakan sembuh dari penyakit.”*

Menurut penulis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan Hak-nya sebagai konsumen dari Rumah Sakit Omni Internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.” Dalam hal ini jasa yang dimaksud adalah pelayanan dokter yang menangani Terdakwa di RS Omni Internasional.

Namun yang dilakukan oleh dokter Hengky dan dokter Grace adalah melanggar kewajiban dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 huruf b, kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan jaminan barang. Hal tersebut tidak dilakukan oleh dokter yang merawat Terdakwa selama di RS Omni Internasional Tangerang, dokter tersebut tidak dapat memberikan keterangan mereka sebelumnya kepada Terdakwa mengenai hasil pemeriksaan darah.

Dalam pertimbangan hakim menyebutkan bahwa, *“Menimbang, bahwa karena e-mail yang dikirimkan Terdakwa tersebut adalah demi kepentingan umum, maka menurut pasal 310 ayat (3) KUHP tersebut e-mail Terdakwa dengan judul " Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang " yang isinya antara lain saya menginformasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk, tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dokter ini dan tanggapan dr. Grace yang katanya penanggung jawab masalah complaint saya ini tidak profesional sama sekali dan tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer" tidak termasuk*

pengertian menista.” Dalam pertimbangan tersebut hakim mempergunakan Pasal 310 KUHP ayat (3) untuk memperjelas rumusan tanpa hak dimana rumusan tersebut digunakan untuk menilai apakah orang boleh dipidana ataupun tidak boleh dipidana orang. Penulis sependapat dengan pertimbangan tersebut dikarenakan alasan pembeda dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, tidak dirumuskan secara tegas karena alasan pembeda dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE umumnya merujuk pada Pasal 310 ayat (3) KUHP adalah pada rumusan,” dengan sengaja dan tanpa hak atau rumusan tanpa hak.” Dalam kasus ini peniadaan sifat melawan hukum perbuatan apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri dan dua keadaan inilah yang menyebabkan si pembuat berhak untuk mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik meskipun isinya bersifat penghinaan.³²

b. Analisis Hukum Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 95/Pid/2009/PT. BTN

Putusan Pengadilan Tinggi menyatakan menolak keberatan/ Eksepsi Terdakwa. Dalam hal ini penulis sependapat dengan putusan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banten yang menetapkan bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum dianggap **Kabur / Obscur Libel, karena tidak menguraikan dengan jelas rangkaian peristiwa sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan.** Pada penjelasan Pasal 143 KUHP menguraikan tentang rumusan surat dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap yang merupakan persyaratan materiil suatu surat dakwaan. Mengenai pengertian cermat, jelas dan lengkap seperti tersebut diatas, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 492 K/Kr/1981 tanggal 8 Januari 1983 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin

³²Lihat Putusan Nomor: 1269/PID.B/2009/PN.TNG

tanggal 20 April 1981 No. 1881/Pid.S/PT/Bjm, syarat materiil Surat Dakwaan adalah adanya rumusan secara lengkap, jelas dan tepat, mengenai perbuatan perbuatanyang didakwakan kepada Terdakwa, sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan-perbuatan itu dengan hukuman (pidana). Dengan demikian, maka dalam surat dakwaan, tidak boleh tidak, harus memuat uraian atau rumusan yang cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang keseluruhannya dapat mengisi secara tepat dan benar, semua unsur dari semua delik yang ditentukan Undang-Undang yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Dalam dakwaan Penuntut Umum, Dalam surat dakwaannya halaman 2, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa: "*... Akan tetapi tanggapan dr. Grace mengenai masalah complain Terdakwa tidak profesional sehingga Terdakwa pada waktu di rawat di RSI Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan e-mail atau surat elektronik, dan yang dimaksud dengan e-mail atau surat elektronik adalah cara pembuatan, pengiriman, penyimpanan dan penerimaan surat/pesan dengan cara menyimpan dan mengirim data surat/pesan melalui media komunikasi elektronik ...*". Kemudian dalam dakwaan Kesatu pada halaman 2 Jaksa Penuntut Umum menguraikan: "*... Selanjutnya Terdakwa mengirim e-mail tersebut melalui alamat e-mail "Prita Mulyasari@yahoo.com" ke sejumlah orang dst.*"

Dalam kedua uraian diatas dalam uraiannnya mendalilkan bahwa Terdakwa mengirim surat elektronik dengan cara menyimpan dan mengirim data suatu pesan melalui komunikasi informasi elektronik. Namun Jaksa Penuntut

Umum tidak menguraikan rangkain peristiwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan mengenai media komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengirimkan surat elektronik tersebut, selain itu Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan nama pihak yang menerima surat elektronik dan tidak menyebutkan alamat surat elektronik pihak penerima dari terdakwa. Maka, dapat dilihat bahwa terdapat ketidakcermatan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengakibatkan menjadi kabur, oleh karenanya itu harus dinyatakan batal demi hukum.

Sependapat dengan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa **dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima** karena penuntut umum mendalilkan adanya dugaan suatu pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa. M. Yahya Harahap (Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Pustaka Kartini, 1985, halaman 662-663) Setelah mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum, ketentuan KUHAP Pasal 156 ayat (1) serta pendapat M. Yahya Harahap tersebut diatas, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam harus dinyatakan sebagai dakwaan yang tidak dapat diterima.

Adapun dalil menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima adalah sebagai berikut :

Dakwaan Penuntut Umum tidak tepat baik mengenai dasar hukum maupun sasaran dakwaannya, karena yang didakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, mengingat Surat Elektronik yang dibuat oleh Terdakwa hanya untuk kalangan terbatas dan bukan

untuk khalayak ramai atau umum sehingga dalam Perbuatan Terdakwa Tidak Terdapat Unsur Melawan Hukum.

Bahwa Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Hal ini berarti Suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu pencemaran nama baik apabila perbuatan tersebut dilakukan di hadapan khalayak umum.

Surat elektronik yang dibuat oleh Terdakwa adalah bentuk cerita atau keluhan terhadap kejadian yang dialami oleh Terdakwa selama dirawat di Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang. Hal tersebut merupakan hak Terdakwa untuk menyatakan pendapatnya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia khususnya Pasal 28E ayat (3), bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Apabila dikaitkan dengan media yang digunakan untuk menyampaikan keluhannya, yaitu melalui surat elektronik. Maka hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 28 F UUD 1945 yang menyatakan bahwa, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Terdakwa dalam mengemukakan pendapatnya melalui alamat e-mail miliknya hanya mengirimkan tulisan tersebut kepada alamat e-mail pribadi orang-

orang terdekatnya dan bukan dikirimkan atau dimuat melalui website yang sifatnya umum yang dapat dikonsumsi oleh khalayak umum. Maka keluhan Terdakwa hanya dapat diakses oleh orang-orang terdekatnya. Menurut penulis e-mail memiliki ruang lingkup akses yang terbatas yang dimana berarti tidak semua orang dapat mudah mengetahui atau mendapatkan informasi. Maka unsur “agar diketahui secara umum” tidak terpenuhi dan perbuatan terdakwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana karena tidak memenuhi unsur utama dari Pasal 310 ayat (1) KUHP.

c. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor:822 K/ Pid.Sus/ 2010

Penulis tidak sependapat dengan Hakim Majelis Mahkamah Agung yang menerima permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 244 KUHP menentukan bahwa putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/ Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Sesuai ketentuan yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa bebas murni maka sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHP permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

Namun pada kenyataannya, larangan pada Pasal 244 ditafsirkan oleh Mahkamah Agung secara *contra legem*, yakni praktek dan penerapan hukum yang secara terang-terangan “bertentangan dengan undang-undang.”³³

Mahkamah Agung tetap menerima permohonan Kasasi oleh Jaksa Penuntut

³³Harahap, M.Yahya, 2006, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 534.

Umum dengan pendapatnya bahwa pembebasan itu bukanlah merupakan pembebasan yang murni maka harus menerima permohonan kasasi tersebut.

Pada kasus Prita Mulyasari Putusan Mahkamah Agung memvonis terdakwa dengan pidana penjara 6 bulan dan menetapkan tidak usah dijalankan kecuali dalam waktu masa percobaan selama 1 (satu) tahun, Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum, atau lazim disebut dengan pidana bersyarat atau pidana dalam masa percobaan.

Perlu dianalisis mengapa Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dalam masa percobaan 1 tahun dalam kasus ini. Mahkamah Agung menjatuhkan putusan tersebut karena Mahkamah Agung yakin bahwa Prita Mulyasari secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :

- a. Setiap orang;
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak;
- c. Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

- d. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum.

Penulis setuju dengan putusan Mahkamah Agung karena yakin bahwa Prita Mulyasari bersalah seharusnya setelah mengetahui bahwa keluhan tidak ditanggapi dengan baik oleh RS OMNI Internasional. Tidak seharusnya Prita Mulyasari melakukan pengiriman e-mail ke sejumlah orang yang berjudul “Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang” akan tetapi seharusnya Prita Mulyasari melakukan pemeriksaan kembali. Prita Mulyasari seharusnya berterimakasih terhadap putusan dari Mahkamah Agung karena dijatuhkan pidana penjara selama 6 bulan dalam masa percobaan selama 1 tahun karena dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menentukan :

”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah).”

Menurut penulis putusan Mahkamah Agung penting bagi Prita sebagai sarana *special prevension* atau pencegahan khusus bagi Prita Mulyasari agar tidak melakukan kesalahan yang sama dikemudian hari. Putusan ini juga berguna sebagai sarana *general prevension* atau pencegahan umum yang artinya bagi masyarakat umum tidak melakukan hal yang sama.